



Aset Masih Tak Genah



- ▶ BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2014
- ▶ Ada temuan dalam pengelolaan aset pada enam unit kerja yang belum tertib
- ▶ Pengelolaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Biro Umum, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan RSUD Soedarso yang belum tertib
- ▶ Terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp20,79 miliar
- ▶ Ada laporan pertanggungjawaban atas belanja hibah sebesar Rp420 juta dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1,08 miliar belum disampaikan kepada Gubernur Kalbar

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2014. Kendati demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya pengelolaan aset pada enam satuan kerja perangkat daerah yang belum tertib. "Pengelolaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Biro Umum,



◆ Ke Halaman 15 kolom 1

GRAFIS : SIGIT /PONTIANAKPOST

Aset Masih Tak Genah

Sambungan dari halaman 9

Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan RSUD Soedarso yang belum tertib," ujar Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar sesuai paripurna istimewa DPRD Provinsi Kalbar, Senin (8/6).

Menurut Bahrullah, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar TA 2014 disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan oleh pemprov. Selain aset, juga terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp20,79 miliar. Ada juga laporan pertanggungjawaban atas belanja hibah sebesar Rp420 juta dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1,08 miliar belum disampaikan kepada Gubernur Kalbar.

Bahrullah menuturkan saat ini tidak ada catatan, tetapi ada temuan yang harus ditindaklanjuti. "Opini WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, karena opini WTP bukan tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," katanya.

Bahrullah menuturkan opini WTP tidak menjamin bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bebas dari kecurangan. Laporan keuangan adalah tanggungjawab pemerintah daerah, sedangkan tang-

gungjawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Bahrullah mengatakan BPK RI mendorong kepala daerah dan kepala SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dan melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah agar dapat mempertahankan opini WTP. Kepala daerah dan SKPD juga didorong segera mengimplementasikan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, serta melakukan penguatan peran inspektorat. "BPK RI berharap pemda dan DPRD segera menindaklanjuti hasil BPK," ujarnya.

Ia menambahkan sesuai amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Kemudian menyampaikan hasil tindaklanjut kepada BPK RI Perwakilan Kalbar selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan pihaknya terus bekerja keras untuk menindaklanjuti rekomendasi dan temuan dari BPK RI. "Namanya juga kerja pemerintah, ini ruwet. Ada lagi kelemahan. Harus kerja keras terus dan terus," ujar Cornelis, kemarin, kemudian menambahkan diperolehnya opini WTP tak terlepas dari pembinaan BPK RI dan

kerja dari kepala SKPD.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, Jakius Sinyor mengatakan masih terdapat pengelolaan aset di instansinya yang harus diselesaikan, terutama berkenaan penyerahan aset dari Kanwil (ketika itu Departemen PU) ke Dinas PU. Terdapat 52 aset tanah, dan dari jumlah tersebut hanya ada dua sertifikat. "Sisanya itu SKT (Surat Keterangan Tanah)," kata Jakius, kemarin.

Ia mengatakan pihaknya membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan aset. Aset-aset yang sejak 1971. "Bayangkan dari 1971. Kami harus cari kepala desanya, dan lainnya. Kami tidak bisa jalan sendiri walaupun sudah inventarisasi. Pemprov sudah membentuk tim termasuk Inspektorat dan sekda ketuanya. Mudah-mudahan dalam 60 hari ini selesai," ungkapnya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Martinus Sudarno memuji kinerja Pemprov Kalbar yang kesekian kalinya kembali memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2014 dari BPK.

Meski begitu, ia juga meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perorangan dan lainnya secepatnya menindaklanjuti arahan BPK RI untuk tertib administrasi dan besaran anggaran yang dikelola. "Pertama jelas kami mengucapkan selamat

dan memberikan apresiasi setinggi-tinggi ke Pemprov, karena kembali memperoleh WTP atas LHP tahun anggaran 2014 dari BPK RI," katanya sesuai paripurna istimewa di gedung DPRD Kalbar, Senin (8/6).

Di satu sisi, lanjutnya, opini WTP kesekian kalinya ini adalah buah kerja keras eksekutif dalam mengelola keuangan daerah. Ini memperlihatkan LHP Pemprov Kalbar pada tahun 2014, kualitasnya hampir mendekati sempurna. Kemungkinan LHP tahun anggaran 2015 berikutnya juga sudah lebih baik lagi.

Meski demikian, beberapa rekomendasi juga wajib ditindaklanjuti dan tak perlu dipersoalkan. "Kami yakin apa yang jadi catatan BPK RI bisa terselesaikan kurang dari 60 hari ke depan," ujarnya.

Martinus menambahkan rekomendasi BPK seperti pengelolaan aset pada enam satuan kerja perangkat daerah yang belum tertib wajib ditindaklanjuti. Selain aset, ia juga berharap kesalahan penganggaran belanja daerah pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp20,79 miliar segera diperbaiki. Sementara laporan pertanggungjawaban atas belanja hibah sebesar Rp420 juta dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1,08 miliar yang belum disampaikan ke Gubernur Kalbar dapat segera dipertanggungjawabkan. "Jangan sampai karena tidak ditindaklanjuti lalu ada temuan. Bisa repot semuanya," ungkap dia. (uni/den)